



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3585-3595
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Konflik
untuk Mendukung SDGs 16 pada Masyarakat Kota Medan**

Fani Nurmalina¹, Dahlia Lubis², Hotmatua Peralihan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: fani0402222009@uinsu.ac.id; dahlialubis@uinsu.ac.id;
hotmatuaperalihan@uinsu.ac.id

Abstrak

Konflik sosial dalam masyarakat multikultural merupakan tantangan penting bagi terwujudnya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagaimana diarahkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 16. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah konflik serta kontribusinya terhadap penguatan SDGs 16 di Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Informan dipilih secara purposif dan terdiri atas tokoh agama dari enam agama serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai pendidik moral, pembimbing spiritual, mediator, fasilitator dialog, dan agen perdamaian. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai toleransi, moderasi beragama, mediasi konflik, dialog lintas agama, pembinaan masyarakat, dan kolaborasi dengan FKUB serta pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi tokoh agama, FKUB, pemerintah, dan masyarakat menjadi modal sosial penting dalam mencegah konflik serta mendukung terwujudnya masyarakat Kota Medan yang damai, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Tokoh Agama; Pencegahan Konflik; Moderasi Beragama; FKUB; SDGs 16.

***Role of Religious Leaders In Conflict
Prevention to Support SDG 16 in Medan City***

Abstract

Social conflict in a multicultural society poses an important challenge to the realization of peace, justice, and strong institutions as promoted by Sustainable Development Goal (SDG) 16. This study aimed to analyze the role of religious leaders in preventing conflict and their contribution to strengthening SDG 16 in Medan City. The study employed a qualitative approach with a phenomenological method. Informants were selected purposively and consisted of religious leaders representing six religions and the Chair of the Medan City Religious Harmony Forum (FKUB). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation and were analyzed interactively through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. Data credibility was strengthened through technique triangulation. The findings showed that religious leaders served as moral educators, spiritual guides, mediators, dialogue facilitators, and peacebuilding agents. These roles were carried out through the promotion of tolerance, religious moderation, conflict mediation, interfaith dialogue, community guidance, and collaboration with FKUB and the

local government. The findings confirmed that synergy among religious leaders, FKUB, government, and society constituted important social capital for preventing conflict and supporting the realization of a peaceful, inclusive, and sustainable society in Medan City.

Keywords: Religious Leaders; Conflict Prevention; Religious Moderation; FKUB; SDG 16.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, tetapi juga menempatkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 16 yang menekankan pembentukan masyarakat yang damai dan inklusif, perluasan akses terhadap keadilan, serta penguatan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan. Pencapaian tujuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tata kelola yang mampu menjamin kehidupan masyarakat secara aman dan harmonis. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara adil dalam proses pembangunan (Hasanah dkk., 2024; Pertiwi, 2023).

Implementasi SDGs 16 masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan agama, etnis, budaya, dan identitas kelompok. Dalam masyarakat yang majemuk, perbedaan dapat menjadi kekuatan sosial apabila dikelola melalui komunikasi dan kerja sama, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila disertai prasangka, intoleransi, fanatisme, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Pemetaan konflik keagamaan di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kerukunan masih terlihat dalam bentuk pembatasan kegiatan keagamaan, penolakan pendirian rumah ibadah, diskriminasi, serta ujaran kebencian yang berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan hukum dan keamanan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam membangun toleransi, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan (Ferdiansyah dkk., 2023; D. Lubis, 2019).

Agama memiliki posisi strategis sebagai sumber nilai moral dan modal sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan kasih sayang, keadilan, persaudaraan, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat solidaritas sosial, mengembangkan sikap saling menghormati, dan mendorong penyelesaian perselisihan secara damai. Dalam konteks tersebut, moderasi beragama menjadi pendekatan yang relevan karena mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan keyakinan sekaligus menghargai hak orang lain untuk menganut dan menjalankan agamanya. Toleransi juga tidak hanya dipahami sebagai sikap menerima keberadaan kelompok lain, tetapi diwujudkan melalui dialog, kerja sama sosial, dan partisipasi bersama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat (Bukhari, 2024; Fitriani & Husaini, 2023; Rahmawati dkk., 2023).

Peran agama dalam menciptakan perdamaian berkaitan erat dengan keberadaan tokoh agama sebagai pemimpin moral di tengah masyarakat. Tokoh agama memiliki legitimasi sosial yang memungkinkan mereka memengaruhi sikap, perilaku, dan cara pandang umat terhadap perbedaan. Selain menyampaikan ajaran keagamaan, tokoh agama dapat berperan sebagai pendidik, pembimbing spiritual, mediator, komunikator, serta penggerak kerja sama lintas kelompok. Kesamaan nilai kemanusiaan yang terdapat dalam berbagai agama dapat digunakan sebagai titik temu untuk membangun komunikasi dan mencegah berkembangnya konflik. Dalam masyarakat multikultural, penguatan nilai *Bhinneka Tunggal Ika*, dialog antarumat beragama, dan kerja sama sosial menjadi bagian

penting dalam menjaga persatuan tanpa menghilangkan identitas keagamaan setiap kelompok (Malingkas, 2023; Sianipar dkk., 2023; Yusuf dkk., 2021).

Sumatera Utara merupakan wilayah dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi. Keragaman tersebut menjadi modal sosial bagi pembangunan daerah, tetapi sekaligus memerlukan pengelolaan yang mampu menjaga hubungan antarkelompok. Pemerintah daerah telah mengintegrasikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk indikator yang berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Namun, pencapaian indikator tersebut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan tokoh agama, organisasi keagamaan, lembaga sosial, dan masyarakat. Kolaborasi berbagai unsur tersebut dibutuhkan untuk memperkuat komunikasi, mendeteksi potensi perselisihan, serta membangun mekanisme penyelesaian konflik yang partisipatif (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024).

Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merepresentasikan masyarakat multikultural yang dihuni oleh beragam kelompok etnis dan agama. Interaksi antarkelompok berlangsung dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan keagamaan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi berkembangnya solidaritas dan kerja sama, tetapi juga membutuhkan upaya berkelanjutan untuk mencegah kesalahpahaman, prasangka, dan konflik identitas. Keberadaan institusi keagamaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi penting sebagai ruang komunikasi, koordinasi, dan mediasi antarumat beragama. Institusi tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan tradisi keagamaan, tetapi juga dapat memperkuat integrasi sosial di tengah perubahan masyarakat yang semakin kompleks (Hasibuan & Siregar, 2025).

Permasalahan yang perlu diperhatikan bukan hanya terjadinya konflik terbuka, tetapi juga masih adanya potensi konflik yang muncul akibat lemahnya komunikasi, rendahnya literasi keberagaman, sikap eksklusif, dan penyebaran informasi provokatif. Beberapa alternatif penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum, penguatan kelembagaan, pendidikan toleransi, literasi digital, dialog lintas agama, dan mediasi berbasis masyarakat. Di antara berbagai alternatif tersebut, penguatan peran tokoh agama menjadi salah satu pendekatan yang penting karena mereka berinteraksi secara langsung dengan umat dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan perdamaian melalui bahasa keagamaan yang mudah diterima. Tokoh agama juga dapat menjadi penghubung antara masyarakat, FKUB, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan dalam mengembangkan langkah pencegahan maupun penyelesaian konflik.

Kajian mengenai moderasi beragama, toleransi, konflik sosial, dan implementasi SDGs telah banyak dilakukan, tetapi pembahasan yang secara khusus menghubungkan peran tokoh agama dengan pencegahan konflik dan pencapaian SDGs 16 dalam konteks masyarakat Kota Medan masih perlu diperkuat. Kajian terdahulu umumnya membahas nilai perdamaian, toleransi, dan kelembagaan secara terpisah, sedangkan praktik tokoh agama sebagai pendidik moral, mediator, fasilitator dialog, dan mitra pemerintah belum dianalisis secara terpadu. Padahal, pemetaan terhadap peran dan pengalaman tokoh agama diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat, pendidikan toleransi, mediasi sosial, dan kolaborasi lintas agama yang sesuai dengan karakter masyarakat Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran tokoh agama dalam mencegah konflik sosial serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian SDGs 16 di Kota Medan. Analisis difokuskan pada fungsi tokoh agama sebagai pembimbing spiritual, pendidik moral, mediator, fasilitator dialog, dan agen perdamaian, termasuk kerja sama yang dibangun bersama FKUB, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penguatan moderasi beragama, dialog lintas agama, literasi keberagaman, dan kapasitas mediasi tokoh agama. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga

keagamaan dalam merumuskan strategi pencegahan konflik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan pemaknaan informan mengenai peran tokoh agama dalam mencegah konflik sosial dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 16. Metode fenomenologi dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman langsung tokoh agama dalam memberikan pembinaan kepada umat, membangun dialog lintas agama, memediasi perselisihan, dan menjalin kerja sama dengan pemerintah serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan (Aflah & Murhayati, 2025; Noor, 2020).

Lokasi, Waktu, dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada [cantumkan bulan dan tahun pelaksanaan penelitian]. Kota Medan dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik masyarakat yang multietnis, multikultural, dan multiagama serta memiliki kelembagaan FKUB yang aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama. Informan penelitian berjumlah tujuh orang, terdiri atas enam tokoh agama yang mewakili Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu serta Ketua FKUB Kota Medan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria memiliki kedudukan atau keterlibatan dalam organisasi keagamaan, memahami kondisi kerukunan umat beragama di Kota Medan, dan mempunyai pengalaman dalam pembinaan masyarakat, dialog lintas agama, atau penyelesaian perselisihan sosial.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, peraturan, laporan kegiatan, arsip FKUB, artikel ilmiah, dan sumber kepustakaan yang berkaitan dengan konflik sosial, moderasi beragama, serta SDGs 16. Wawancara dilakukan secara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai pengalaman informan dalam mencegah konflik, bentuk pembinaan yang diberikan kepada umat, mekanisme penyelesaian perselisihan, serta pola kerja sama dengan FKUB dan pemerintah daerah. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik komunikasi, dialog, dan kegiatan kerukunan antarumat beragama. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam pengumpulan, pengorganisasian, dan penafsiran data. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam suara, catatan lapangan, serta lembar dokumentasi. Sebelum wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan penggunaan data. Wawancara direkam setelah memperoleh persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen diseleksi, ditranskripsikan, serta dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian dikodekan ke dalam tema-tema yang meliputi peran tokoh agama sebagai pendidik moral, pembimbing spiritual, mediator, fasilitator dialog, dan agen

perdamaian; strategi pencegahan konflik; bentuk penyelesaian perselisihan; serta kontribusi tokoh agama terhadap pencapaian SDGs 16. Data yang telah dikelompokkan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan perbandingan pandangan antar-informan. Tahap terakhir dilakukan dengan menafsirkan pola hubungan antartemuan serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diverifikasi (Noor, 2020).

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh agama yang berbeda dan Ketua FKUB Kota Medan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan pemeriksaan kembali terhadap transkrip, catatan lapangan, serta kesesuaian antara hasil interpretasi dan informasi yang diberikan informan. Prosedur tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan ketepatan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan Konflik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama di Kota Medan memiliki peran yang melampaui pelaksanaan ritual dan pembinaan internal umat. Mereka berfungsi sebagai pembimbing spiritual, pendidik moral, teladan sosial, mediator, fasilitator dialog, dan agen perdamaian dalam masyarakat yang multietnis dan multiagama. Peran tersebut dibentuk oleh kedudukan tokoh agama sebagai pemimpin informal yang memiliki kepercayaan, legitimasi moral, serta kedekatan langsung dengan masyarakat. Melalui khutbah, ceramah, pembinaan keagamaan, dialog lintas agama, dan kegiatan sosial, tokoh agama menanamkan nilai toleransi, pengendalian diri, penghormatan terhadap perbedaan, dan penyelesaian masalah secara damai.

Temuan dari enam tokoh agama memperlihatkan bahwa konflik sosial pada umumnya tidak bersumber dari ajaran agama, tetapi dipengaruhi oleh cara individu atau kelompok memahami dan mengekspresikan identitas keagamaannya. Sikap merasa paling benar, fanatisme kelompok, prasangka, kepentingan sosial-politik, rendahnya literasi keberagaman, lemahnya komunikasi, dan penyebaran informasi yang tidak benar menjadi faktor yang dapat meningkatkan ketegangan antarkelompok. Temuan tersebut selaras dengan pemetaan konflik keagamaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa konflik sering berkembang melalui pembatasan aktivitas keagamaan, penolakan rumah ibadah, diskriminasi, dan ujaran kebencian, bukan semata-mata karena perbedaan doktrin agama (Ferdiansyah dkk., 2023).

Tokoh agama Islam menempatkan nilai *ukhuwah*, *tasamuh*, *islah*, dan *rahmatan lil 'alamin* sebagai dasar pencegahan konflik. Pencegahan dilakukan dengan membimbing umat agar tidak merasa paling benar dalam kehidupan sosial, menjaga perkataan, mengendalikan emosi, menghormati keyakinan orang lain, dan mengutamakan perdamaian ketika terjadi perselisihan. Penghormatan terhadap perbedaan tersebut juga dihubungkan dengan Q.S. Al-Kāfirūn ayat 6 yang menegaskan adanya batas keyakinan sekaligus penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pembinaan spiritual dipandang penting karena kemampuan menyelesaikan konflik secara damai memerlukan kematangan emosi dan pengendalian diri yang dibentuk melalui pemahaman keagamaan yang moderat (S. A. Lubis, komunikasi pribadi, 2026). Temuan ini mendukung pandangan bahwa moderasi Islam dapat menjadi pendekatan untuk mencegah konflik melalui keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap kehidupan sosial yang majemuk (Bukhari, 2024; Utami & Hasanah, 2026).

Tokoh agama Kristen Protestan dan Katolik menempatkan kasih, komunikasi, dan dialog sebagai prinsip utama pembangunan perdamaian. Sikap klaim kebenaran yang diekspresikan dengan merendahkan kelompok lain dipandang dapat memunculkan jarak sosial dan konflik. Oleh karena itu, dialog tidak hanya dilakukan ketika perselisihan telah terjadi, tetapi perlu dibangun sejak awal melalui hubungan yang terbuka dan saling percaya antarpemuka agama. Pengalaman penyelesaian persoalan penggunaan rumah ibadah di

Marelan menunjukkan bahwa komunikasi yang melibatkan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dapat menghasilkan penyelesaian yang diterima bersama. Hubungan yang telah terbentuk sebelum konflik terjadi menjadi modal sosial yang memudahkan proses mediasi ketika muncul persoalan di tengah masyarakat (Apinem, komunikasi pribadi, 2026; B. O. Tage, komunikasi pribadi, 2026).

Dalam perspektif Buddha, pencegahan konflik berkaitan dengan pengamalan Jalan Mulia Berunsur Delapan, terutama pikiran benar (*sammā saṅkappa*), ucapan benar (*sammā vācā*), dan perbuatan benar (*sammā kammanta*). Ketiga unsur tersebut mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari kemampuan seseorang mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakannya. Tokoh agama karena itu harus menjadi teladan sebelum mengajak umat menghargai kelompok lain. Pengalaman dalam memediasi persoalan pendirian vihara dan gereja juga menunjukkan bahwa dialog dan keterlibatan FKUB menjadi bagian penting dalam mencegah persoalan administratif dan sosial berkembang menjadi konflik keagamaan (B. Mukhtar, komunikasi pribadi, 2026).

Tokoh agama Hindu memandang bahwa pembangunan perdamaian perlu dimulai dari keluarga dan selanjutnya dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Konsep *Tri Hita Karana* menjadi landasan dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nilai tersebut diterapkan melalui pembinaan umat, musyawarah, keteladanan, dan fasilitasi penyelesaian perselisihan internal maupun eksternal. Tokoh agama juga perlu memiliki kemampuan menyampaikan ajaran perdamaian secara kontekstual agar dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam menghadapi persoalan sosial kontemporer (S. Raja, komunikasi pribadi, 2026).

Dalam ajaran Konghucu, pencegahan konflik berangkat dari pengendalian diri dan kemampuan memahami akar persoalan. Penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan memberikan penilaian secara tergesa-gesa, tetapi diawali dengan mengidentifikasi penyebab, pihak yang terlibat, dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Nilai *Ren* atau cinta kasih, *Li* atau kesusilaan, dan *He* atau keharmonisan menjadi pedoman untuk membentuk karakter, menghormati orang lain, serta menyelesaikan masalah melalui dialog dan musyawarah. Dengan demikian, tokoh agama Konghucu berperan sebagai pendidik moral sekaligus mediator yang membantu masyarakat mengendalikan diri dan mempertahankan keharmonisan sosial (M. Linggouw, komunikasi pribadi, 2026).

Tabel 1. Nilai Keagamaan dan Bentuk Pencegahan Konflik

Tradisi keagamaan	Nilai utama	Bentuk pencegahan konflik
Islam	<i>Ukhuwah, tasamuh, islah, dan rahmatan lil 'alamin</i>	Pembinaan spiritual, menjaga ucapan, menghormati keyakinan lain, dan mendamaikan pihak yang berselisih
Kristen Protestan dan Katolik	Kasih, komunikasi, dan pelayanan	Dialog terbuka, pembangunan kepercayaan, dan keterlibatan dalam mediasi
Buddha	<i>Sammā saṅkappa, sammā vācā, sammā kammanta, mettā, dan karuṇā</i>	Pengendalian pikiran, perkataan, tindakan, keteladanan, dan mediasi
Hindu	<i>Tri Hita Karana</i> dan <i>Tat Tvam Asi</i>	Pembinaan keluarga, musyawarah, keteladanan, dan penghormatan terhadap sesama
Konghucu	<i>Ren, Li, dan He</i>	Pembentukan karakter, pengendalian diri, identifikasi akar masalah, dan dialog

Meskipun istilah dan dasar teologis yang digunakan berbeda, seluruh informan memiliki orientasi yang sama, yaitu penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai *tasamuh* dalam Islam, kasih dalam Kristen, hukum kasih dalam Katolik, *mettā* dan *karuṇā* dalam Buddha, *Tat Tvam Asi* dalam Hindu, serta *Ren* dalam Konghucu menunjukkan

adanya titik temu etis yang dapat menjadi landasan kerja sama lintas agama. Persamaan tersebut tidak menghapus identitas dan perbedaan doktrinal setiap agama, tetapi menyediakan ruang bersama untuk membicarakan persoalan kemanusiaan, menjaga ketertiban, dan mencegah kekerasan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa agama dapat berfungsi sebagai perekat sosial apabila nilai-nilai kemanusiaannya diterapkan melalui dialog dan kerja sama. Sebaliknya, agama dapat terlibat dalam konflik ketika identitas keagamaan digunakan secara eksklusif untuk memperkuat batas antarkelompok. Karena itu, kontribusi tokoh agama tidak hanya terletak pada penyampaian doktrin, tetapi juga pada kemampuan menerjemahkan ajaran agama menjadi sikap sosial yang menghormati keberagaman (Malingkas, 2023; Sianipar dkk., 2023).

Dialog, Mediasi, dan Kolaborasi dalam Penyelesaian Perselisihan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persoalan keagamaan di Kota Medan umumnya berkaitan dengan pendirian atau penggunaan rumah ibadah, kesalahpahaman antarwarga, lemahnya komunikasi, kepentingan kelompok, dan penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Persoalan tersebut tidak selalu berkembang menjadi konflik terbuka, tetapi dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak segera direspons. Tokoh agama dan FKUB karena itu mengutamakan pendekatan dialogis, komunikasi terbuka, mediasi, dan musyawarah agar perbedaan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan atau perpecahan sosial (M. Y. Tanjung, komunikasi pribadi, 2026).

Kasus penggunaan bangunan sementara Gereja Elim di Marelان dan persoalan pendirian rumah ibadah di kawasan Gaharu V menggambarkan penerapan pendekatan tersebut. Penyelesaian melibatkan tokoh agama, FKUB, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Setiap pihak diberikan ruang untuk menjelaskan posisi, kebutuhan, dan kekhawatirannya. Musyawarah kemudian diarahkan pada pencarian penyelesaian yang dapat diterima bersama tanpa mengabaikan ketenteraman masyarakat dan hak kelompok keagamaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat, tetapi juga sebagai komunikator yang menerjemahkan aspirasi masyarakat dan membangun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Berdasarkan temuan tersebut, mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dipetakan ke dalam tiga tahapan. Pertama, tahap pencegahan melalui pembinaan umat, pendidikan toleransi, pembangunan hubungan antarpemuka agama, dan pemantauan terhadap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Kedua, tahap penanganan melalui dialog, klarifikasi informasi, mediasi, dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait. Ketiga, tahap pemeliharaan perdamaian melalui pelaksanaan kesepakatan, komunikasi lanjutan, serta kegiatan bersama untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan antarkelompok.

Pola tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Kota Medan tidak hanya bersifat reaktif. Pencegahan dilakukan melalui dialog lintas agama, pembentukan Pemuda Kerukunan dan Perempuan Kerukunan, FKUB Expo, olahraga bersama, lomba pidato, cerdas cermat bertema kerukunan, dan kegiatan sosial lainnya. Program-program tersebut memperluas ruang pertemuan sehingga masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda tidak hanya bertemu dalam situasi formal atau ketika konflik terjadi. Interaksi yang dilakukan secara berkelanjutan membantu mengurangi prasangka, memperkuat komunikasi, dan membangun pengalaman kerja sama antarkelompok (M. Y. Tanjung, komunikasi pribadi, 2026).

Edukasi literasi digital juga menjadi bagian penting dalam pencegahan konflik. Arus informasi digital memungkinkan berita bohong, ujaran kebencian, dan narasi provokatif menyebar secara cepat serta menjangkau masyarakat luas. Tokoh agama dapat membantu umat memeriksa kebenaran informasi, tidak tergesa-gesa membagikan berita, dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menggunakan sentimen keagamaan. Peran tersebut

memperlihatkan bahwa pembinaan kerukunan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan media digital dan tidak hanya dilakukan melalui forum tatap muka.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas penyelesaian perselisihan ditentukan oleh hubungan kolaboratif antara tokoh agama, FKUB, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan, dan masyarakat. Tokoh agama menyediakan legitimasi moral dan kedekatan dengan umat, FKUB memfasilitasi komunikasi lintas agama, pemerintah memberikan dukungan kebijakan dan administratif, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga kesepakatan. Kolaborasi tersebut membentuk modal sosial berupa kepercayaan, jaringan komunikasi, norma kebersamaan, dan kesediaan untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menempatkan toleransi, dialog, dan kerja sama lintas agama sebagai unsur penting dalam pembangunan perdamaian. Dialog menjadi efektif ketika tidak berhenti pada pertemuan simbolis, tetapi dilanjutkan dengan kerja sama konkret, komunikasi berkelanjutan, dan mekanisme penyelesaian masalah yang dapat diakses masyarakat. Institusi keagamaan di Kota Medan dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan solidaritas dan integrasi sosial di tengah perubahan masyarakat (Hasibuan & Siregar, 2025; Rahmawati dkk., 2023).

Kontribusi Tokoh Agama terhadap Pencapaian SDGs Tujuan 16

Peran tokoh agama dalam pencegahan konflik memiliki hubungan langsung dengan SDGs Tujuan 16 yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, masyarakat inklusif, dan kelembagaan yang tangguh. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui pendidikan toleransi, penguatan moderasi beragama, penyelesaian perselisihan secara damai, pembangunan budaya dialog, serta kerja sama antara lembaga keagamaan dan pemerintah. Tokoh agama membantu menerjemahkan tujuan pembangunan global ke dalam nilai dan tindakan yang dapat dipahami masyarakat melalui bahasa keagamaan dan praktik sosial sehari-hari.

Kegiatan pembinaan umat, mediasi, dan dialog lintas agama mendukung Target 16.1 mengenai pengurangan segala bentuk kekerasan. Pencegahan dilakukan dengan mengendalikan prasangka, membuka komunikasi, mengklarifikasi informasi, dan menyelesaikan ketegangan sebelum berkembang menjadi kekerasan. Musyawarah dan mediasi turut mendukung semangat Target 16.3 karena memberikan ruang penyelesaian perselisihan secara tertib, adil, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap menghormati mekanisme hukum yang berlaku.

Kolaborasi tokoh agama dengan FKUB dan pemerintah berkaitan dengan Target 16.6 mengenai pembangunan institusi yang efektif, akuntabel, dan responsif. Dalam konteks ini, FKUB berfungsi sebagai wadah koordinasi dan komunikasi lintas agama yang membantu pemerintah memahami persoalan di masyarakat. Pelibatan tokoh agama, masyarakat, organisasi keagamaan, perempuan, dan pemuda dalam dialog juga mendukung Target 16.7 mengenai pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, dan representatif.

Penanaman nilai kesetaraan, penghormatan terhadap keyakinan, dan penolakan terhadap diskriminasi berhubungan dengan Target 16.b mengenai pengembangan kebijakan dan perilaku yang tidak diskriminatif. Tokoh agama memiliki posisi penting dalam membentuk pemahaman umat bahwa penghormatan terhadap kelompok lain tidak berarti mengurangi keyakinan terhadap agamanya sendiri. Sikap tersebut justru menjadi bentuk tanggung jawab sosial untuk menjaga keamanan, martabat manusia, dan kehidupan bersama.

Tabel 2. Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Target SDGs Tujuan 16

Target SDGs 16	Temuan penelitian	Bentuk kontribusi
16.1	Pembinaan toleransi, dialog, dan deteksi dini perselisihan	Mengurangi risiko kekerasan dan konflik horizontal
16.3	Mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian perselisihan	Membuka akses terhadap mekanisme penyelesaian yang tertib dan damai
16.6	Sinergi tokoh agama, FKUB, pemerintah, dan masyarakat	Memperkuat efektivitas kelembagaan kerukunan
16.7	Pelibatan tokoh lintas agama, pemuda, perempuan, dan masyarakat	Mendorong pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif
16.b	Pendidikan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman	Mencegah diskriminasi dan memperkuat perlakuan yang setara

Hasil penelitian menegaskan bahwa kontribusi tokoh agama terhadap SDGs Tujuan 16 tidak hanya berlangsung melalui penyelesaian konflik yang telah terjadi, tetapi juga melalui pembangunan budaya damai secara berkelanjutan. Pendidikan moral, pembinaan spiritual, keteladanan, literasi digital, dialog, mediasi, dan kegiatan lintas agama membentuk ekosistem sosial yang mendukung pencegahan konflik. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa pencapaian perdamaian dan kelembagaan yang tangguh memerlukan keterlibatan aktor formal dan informal secara bersamaan (Hasanah dkk., 2024; Pertiwi, 2023).

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, temuan ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan program penguatan kapasitas tokoh agama yang meliputi pelatihan mediasi, komunikasi lintas agama, pendidikan moderasi beragama, literasi digital, dan deteksi dini konflik. Program tersebut perlu melibatkan FKUB, perguruan tinggi, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, pemuda, dan perempuan agar pencegahan konflik tidak hanya bergantung pada beberapa tokoh. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penyusunan modul, pendampingan komunitas, pelatihan fasilitator perdamaian, dan evaluasi program kerukunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, tokoh agama di Kota Medan berperan sebagai penghubung antara nilai keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat multikultural. Kesamaan orientasi kemanusiaan yang terdapat dalam setiap agama menjadi modal sosial untuk membangun kepercayaan, mengembangkan dialog, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Sinergi antara tokoh agama, FKUB, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan, dan masyarakat karena itu menjadi faktor penting dalam mewujudkan masyarakat Kota Medan yang damai, inklusif, serta mendukung pencapaian SDGs Tujuan 16.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama di Kota Medan memiliki peran strategis dalam mencegah konflik sosial dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 16. Peran tersebut diwujudkan sebagai pembimbing spiritual, pendidik moral, teladan sosial, mediator, fasilitator dialog, komunikator, dan agen perdamaian. Meskipun setiap agama menggunakan konsep dan istilah yang berbeda, seluruh tokoh agama memiliki titik temu pada nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kasih sayang, toleransi, pengendalian diri, musyawarah, dan keharmonisan. Nilai-nilai tersebut diterapkan melalui pembinaan umat, dialog lintas agama, mediasi perselisihan, pendidikan toleransi, literasi digital, dan keteladanan sosial. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa konflik tidak semata-mata muncul karena perbedaan agama, tetapi lebih sering

dipengaruhi oleh fanatisme kelompok, prasangka, lemahnya komunikasi, rendahnya pemahaman terhadap keberagaman, dan penyebaran informasi yang tidak benar.

Penyelesaian perselisihan di Kota Medan dilakukan melalui dialog, mediasi, musyawarah, dan kerja sama antara tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi keagamaan, serta masyarakat. Pola kolaboratif tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik yang telah terjadi, tetapi juga mencegah berkembangnya ketegangan melalui pembinaan kerukunan, pelibatan pemuda dan perempuan, serta penguatan komunikasi antarkelompok. Oleh karena itu, penguatan kapasitas tokoh agama dalam bidang mediasi, komunikasi lintas agama, moderasi beragama, literasi digital, dan deteksi dini konflik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sinergi antara tokoh agama, FKUB, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan Kota Medan yang damai, inklusif, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs 16.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, F. R., & Murhayati, S. (2025). Penelitian Fenomenologis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13099–13109. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.27068>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/12a087ad9fceb73a2db9a9c2/indikator-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-provinsi-sumatera-utara-2024.html>
- Bukhari. (2024). Moderasi Beragama: Jalan Tengah Menuju Keharmonisan. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.3317>
- Ferdiansyah, H., Irsyadi, M. M., Nisa', N., Lubis, Z., & Nugroho, A. S. (2023). Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di Indonesia (2019–2022). *Tashwirul Afkar*, 42(1), 105–134. <https://doi.org/10.51716/ta.v42i1.172>
- Fitriani, & Husaini, A. (2023). Membangun Perdamaian Pasca Konflik. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 3(4), 1188–1195. <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v3i4.3278>
- Hasanah, A. I., Hayat, Suyeno, Ilyas, T. R., & Afifudin. (2024). Peran United Nations Development dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat di Indonesia. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(2), 550–563.
- Hasibuan, S., & Siregar, R. M. (2025). Melacak Jejak Institusi Agama di Medan: Penjaga Tradisi di Tengah Modernitas. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social and Humanities*, 3(1), 15–20.
- Lubis, D. (2019). *Peran Alumni Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dalam Meningkatkan Keagamaan dan Kerukunan di Kota Medan* [Laporan Penelitian]. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://saa.uinsu.ac.id/laporan-penelitian/>
- Malingkas, M. (2023). Peranan Agama-Agama dalam Upaya Menciptakan Perdamaian. *Jurnal Christian Humaniora*, 7(2), 84–97. <https://doi.org/10.46965/jch.v7i2.2387>
- Noor, Z. Z. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Petunjuk Praktis untuk Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Deepublish. <https://books.google.com/books?id=v37LEAAQBAJ>
- Pertiwi, M. S. (2023). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Perwujudan Perdamaian di Dunia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 86–89. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.34104>

- Rahmawati, W., Sukmawati, N., & Sari, J. A. (2023). The Effectiveness of Religious Tolerance in Realizing Peace through Achievement Program SDGs. *Sustainability: Theory, Practice and Policy*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.30631/sdgs.v1i1.1814>
- Sianipar, G., Judijanto, L., Jenuri, Abubakar, Hakim, L. D. R., & Supriyanto, A. (2023). Pengaruh Agama terhadap Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 149–152. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i4.19843>
- Utami, F. D., & Hasanah, I. (2026). Peran Moderasi Islam dalam Mencegah Konflik Sosial di Masyarakat. *NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies*, 1(1), 77–84.
- Yusuf, M., Shihabudin, M., Hati, P. L. D. C. P., Angelina, A. R., & Farhansyah, A. (2021). *Peran dan Fungsi Agama dalam Menyikapi Multikulturalisme di Indonesia dengan Konsep Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar Kesatuan dan Persatuan*. https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2021/09/126_AR1.pdf